

SUBTANSI AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PERUSAHAAN

Dhea Nila Anggraini *¹

Dila Sepriani ²

Evaliana ³

Ihsan Doni Wijaya ⁴

Muhammad Rendi ⁵

Rianti Rahma ⁶

Siti Khodijah ⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} UIN Raden Intan Lampung

*e-mail : dheanilaanggraini@gmail.com

Abstrak

Akuntansi Keuangan sosial dan Lingkungan terhadap keberlanjutan perusahaan dalam rangka mencapai laba, perusahaan sebagai salah satu entitas terkadang mengorbankan aspek sosial dan lingkungannya. Dimana dampak tanggung jawab sosial dan lingkungan dari kegiatan operasi perusahaan tidak terbatas pada investor, yaitu memberikan pengembalian yang maksimal kepada investor. Kepentingan publik dan lingkungan juga perlu mendapat perhatian perusahaan sebagai dukungan atas operasi perusahaan. Pelestarian lingkungan harus bermanfaat bagi masyarakat di sekitar juga bermanfaat bagi perusahaan khususnya perusahaan yang memanfaatkan lingkungan dan mendapatkan keuntungan dari lingkungannya. Urgensi akuntansi sosial dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan lingkungan adalah sebagai suatu sistem informasi akuntansi yang menyediakan informasi mengenai aspek lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar pihak manajemen dapat meningkatkan kinerja lingkungan sekaligus kinerja keuangannya yang secara tidak langsung akan berdampak pada keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Akuntansi Sosial, Akuntansi Lingkungan, dan Keberlanjutan perusahaan.

Abstract

Social and Environmental Financial Accounting for company sustainability in order to achieve profits, companies as an entity sometimes sacrifice aspects social and environmental. Where is the impact of social and environmental responsibility of activities The company's operations are not limited to investors, that is, it provides maximum returns to investors. Public and environmental interests also need to receive company attention as support for company operations. Environmental preservation must be beneficial for The surrounding community is also beneficial for companies, especially companies that use it environment and benefit from it. The urgency of social and environmental accounting as The form of corporate responsibility in environmental management is as a system accounting information that provides information regarding environmental aspects. This is intended so that management can improve environmental performance as well as financial performance This will indirectly impact the company's sustainability in the future.

Keywords: Social Accounting, Environmental Accounting, and Corporate Sustainability.

PENDAHULUAN

Akuntansi sosial dan lingkungan menjadi sorotan penting bagi akuntan. Akuntansi ini sangat penting karena perusahaan perlu menyampaikan informasi mengenai aktivitas sosial dan perlindungan terhadap lingkungan kepada stakeholder perusahaan. Perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai keuangan kepada investor dan kreditor yang telah ada serta calon investor atau kreditor perusahaan, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan sosial di mana perusahaan beroperasi.

Bentuk tanggung jawab perusahaan dan kepada siapa perusahaan bertanggung jawab dapat dijelaskan oleh beberapa teori. Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada

investor atau kepada kreditor, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lain, misalnya karyawan, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, media, organisasi industri, dan kelompok kepentingan lainnya.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, akuntansi berfungsi untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Selama ini, laporan keuangan hanya difokuskan kepada kepentingan investor dan kreditor sebagai pemakai utama laporan keuangan. Banyak pihak lain yang juga memerlukan informasi keuangan, yang selayaknya mendapatkan perhatian yang sama. Selama ini perusahaan hanya menyampaikan informasi mengenai hasil operasi keuangan perusahaan kepada pemakai, tetapi mengabaikan eksternalitas dari operasi yang dilakukannya, misalnya polusi udara, pencemaran air, pemutusan hubungan kerja, dan lainnya.

Akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan berita di surat kabar mengenai dampak operasi perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan di mana mereka beroperasi. Seharusnya bidang akuntansi memperhatikan hal seperti ini dan berperan dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan sebagai bentuk pertanggung-jawaban sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan - bahan pustaka yang relevan. Studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka (*literature review*), dan tinjauan teoritis¹.

LITERATURE REVIEW

Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting* atau *EA*) merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*environmental costs*) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan (Ikhsan 2008:13).

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environment Protection Agency* (US EPA) (Ikhsan 2008:15), akuntansi lingkungan adalah :

“Suatu fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para *stakeholders* perusahaan yang mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan”².

Urgensi Akuntansi Lingkungan

Reformasi dan transformasi akuntansi konservatif atau akuntansi konvensional yang berfokus pada akuntansi keuangan menuju Akuntansi Hijau yang berfokus pada pelaporan informasi akuntansi lingkungan, sosial dan keuangan secara terpadu dalam satu paket pelaporan dirasakan kian penting dan mendesak (Greenham, 2010). Ada beberapa alasan krusial yang mendasarinya.

¹ Trung Tâm et al., “濟無No Title No Title No Title” 01 (2016): 1–23.

² Dewi et al., “Analisis Akuntansi Lingkungan Pada Pt Rea Kaltim Plantations Environmental Accounting Analysis at Pt Rea Kaltim Plantations,” *Akuntansi* 15, no. 2 (2018): 84–93.

Pertama, sama seperti negara-negara lain, Indonesia juga sedang menghadapi krisis ekologi atau krisis lingkungan yang serius dan menakutkan. Krisis tersebut telah menimbulkan berbagai bencana ekologi dan bencana sosial yang sangat merugikan dan mengancam keberlanjutan kehidupan umat manusia. Perubahan iklim dan pemanasan global serta kerusakan lingkungan telah menimbulkan berbagai bencana alam, bencana sosial dan bencana ekonomi yang serius. Berbagai bencana tersebut juga telah menyebabkan krisis energi dan kelangkaan sumberdaya, kemiskinan, kemelaratan, kesenjangan sosial dan penderitaan rakyat yang makin serius.

Secara umum, sejumlah literatur menyebutkan bahwa penyebab utama krisis tersebut adalah akibat perilaku keserakahan dan ketamakan negara, korporasi dan masyarakat luas dalam membangun perekonomian dan mendorong kemajuan negara (Maunders & Burritt. 1991, Gore, 2013; Thornton, 2013). Krisis tersebut dipicu dan dipacu oleh hasrat pemerintah dan para pelaku ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan laba sebesar-besarnya (*profit maximize*). Motif tersebut juga telah mendorong para pemimpin negara dan pelaku ekonomi berperilaku serakah dan tamak. Mereka mengeksploitasi sumberdaya alam dan sumberdaya sosial, serta merusak lingkungan.

Secara khusus, akuntansi juga dituding turut mendorong perilaku buruk tersebut (Deegan, 2013). Akuntansi dituding menjadi pemicu-pemacu terjadinya krisis ekologi dan krisis sosial karena mendorong negara dan para pelaku ekonomi-bisnis berperilaku serakah dan tamak dalam melakukan aktivitas perekonomian. Alasannya, karena prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang mendasari praktik-praktik akuntansi konvensional oleh entitas korporasi selama ini mengabaikan pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan dan pelaporan informasi serta pengungkapan informasi akuntansi sosial dan lingkungan dalam pelaporan informasi akuntansi. Pengakuan, pengukuran nilai dan pencatatan serta pelaporan akuntansi terhadap obyek, peristiwa, fenomena atau transaksi-transaksi sosial dan lingkungan yang berelasi dengan entitas korporasi cenderung diabaikan.

Demikian pula perlakuan akuntansi terhadap pengorbanan sumberdaya ekonomi dan nonekonomi untuk aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) maupun terhadap manfaat-manfaat dan risiko-risiko ekonomi dan nonekonomi (*costs, risks, benefits*) dari aktivitas TJSL tersebut juga cenderung salah kaprah. Akibatnya, informasi akuntansi yang tersaji dalam pelaporan keuangan (*financial reporting*) dan pelaporan tahunan (*annual reporting*) cenderung menyesatkan para pemakai dalam evaluasi dan penilaian kinerja maupun dalam pengambilan keputusan. Karena itu, reformasi dan transformasi akuntansi konvensional menuju Akuntansi Hijau menjadi mendesak dan diharapkan menjadi solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan krisis ekologi dan krisis sosial yang mengancam keberlanjutan pertumbuhan Indonesia.

Kedua, pada Juli 2007 DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 74 menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (ayat 1). Tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (ayat 2). Bagi perseroan yang tidak melaksanakannya maka akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku (ayat 3). Sementara pada Pasal 66 dinyatakan bahwa semua perseroan wajib menyajikan informasi kinerja tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dalam Laporan Tahunan Direksi kepada RUPS. Pada April 2012, Pemerintah telah menerbitkan PP No.47/2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSLP). Dengan adanya PP tersebut, sejak tahun 2012, TJSLP telah menjadi kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan serta dilaksanakan secara periodik dan dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.

Fakta-fakta empiris menunjukkan bahwa pasca UUPT disahkan DPR pada Juli 2007, banyak perusahaan mulai peduli dan melaksanakan TJSLP yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun melaksanakan tanggung jawab sosial korporasi (*corporate social responsibility/CSR*) yang bersifat

sukarela (*voluntary*). Banyak korporasi publik dan privat mulai berkomitmen melaksanakan TJSLS dan CSR secara berkesinambungan serta melaporkan informasinya dalam Laporan Tahunan Direksi. Juga, selain jumlah perusahaan yang melaksanakan TJSLS dan CSR terus meningkat, luas pengungkapan informasinya dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan juga kian meningkat. TJSLS dan CSR bahkan telah diakui sebagai kebutuhan utama korporasi dalam relasi dengan para *stakeholder* dan menjadi investasi strategis bagi korporasi bertumbuh kembang secara bisnis (Lako, 2015a: Berkah CSR Bukan Fiksi). Banyak korporasi juga telah menjadikan TJSLS dan CSR sebagai bagian integral dari sistem tatakelola korporasi yang baik (*good corporate governance/GCG*).

Diwajibkannya TJSLS sebagai kewajiban perseroan seharusnya membawa konsekuensi serius bagi perubahan kerangka konseptual dan standar akuntansi serta praktik akuntansi, terutama menyangkut pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, dan peringkasan informasi terhadap obyek, transaksi, peristiwa, biaya, upaya dan manfaat TJSLS dan CSR, serta pelaporan informasinya dalam pelaporan akuntansi. Namun hingga kini, respon IAI atau profesi akuntansi terhadap pengorbanan sumberdaya ekonomi dan nonekonomi untuk melaksanakan aktivitas TJSLS dan CSR masih sangat konservatif. Mengapa?

Jawabnya, karena selama ini pengorbanan untuk aktivitas TJSLS dan CSR umumnya diakui dan diperlakukan sebagai beban periodik (*expense*) yang mengurangi likuiditas, laba, beban pajak dan ekuitas pemegang saham. Sementara di sisi lain, sejumlah manfaat ekonomi dan nonekonomi (*benefits*) yang diperoleh korporasi dari pelaksanaan TJSLS dan CSR sama sekali tidak diakui, diukur, dilaporkan dan diungkapkan dalam pelaporan akuntansi. Padahal, secara empiris banyak hasil riset telah menunjukkan bahwa pengorbanan untuk TJSLS dan CSR mendatangkan banyak manfaat ekonomi dan nonekonomi atau berkah berlimpah bagi korporasi (Lako, 2016: Kekuatan CSR dan Reformasi Pengakuan Akuntansi). Pengorbanan tersebut meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan (Lako, 2015a). Karena itu, banyak kalangan menilai bahwa informasi akuntansi yang tersaji dalam pelaporan keuangan dan pelaporan tahunan selama ini sangat tidak reliabel dan relevan. Laporan akuntansi dinilai telah menyesatkan banyak pihak dalam evaluasi dan penilaian kinerja, risiko, return dan prospek keberlanjutan korporasi, serta dalam pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi. Alasannya, karena terjadi salah kaprah dalam perlakuan akuntansi, pengukuran nilai dan pelaporan informasi akuntansi terhadap *costs-benefits* dari TJSLS dan CSR. Karena itu, muncul desakan dari sejumlah kalangan pebisnis dan akademisi agar IAI segera mengembangkan dan mengaplikasikan Akuntansi Hijau agar bisa menyajikan informasi akuntansi keuangan, sosial dan lingkungan secara utuh, terpadu dan berkelanjutan dalam satu paket pelaporan akuntansi. Pelaporan secara terintegrasi tersebut, selain akan menjadikan pelaporan keuangan, pelaporan tahunan dan pelaporan berkelanjutan menjadi semakin relevan, reliabel dan bermanfaat, juga akan berkontribusi besar pada upaya-upaya bersama untuk mengatasi krisis ekologi dan sosial.

Ketiga, pasca KTT Bumi 20+ di Rio de Janeiro pada Juni 2012, dimana Indonesia turut berperan aktif dalam merumuskan dokumen "*The Future We Want*" dan konsep *Green Economy* untuk mendukung terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan dan Penghapusan Kemiskinan, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah dan para pelaku ekonomi gencar mengampanyekan gerakan ekonomi hijau (*green economy*) dan bisnis hijau (*green business*) dalam praktik ekonomi dan bisnis. Dalam praktiknya, banyak korporasi merespon gerakan "*go green*" tersebut dengan mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip *green business, green industry, green corporation, green management, green production, green finance* dan lainnya dalam upaya menjadikan korporasi semakin efisien, efektif dan bertumbuh kembang secara berkelanjutan (*sustainability*), serta berkontribusi besar pada upaya-upaya mencegah krisis sosial dan krisis ekologi. Informasi terkait berbagai upaya tersebut diungkapkan dalam pelaporan tahunan dan pelaporan berkelanjutan korporasi.

Secara umum, motif utama korporasi berperan aktif dalam gerakan "*go green*" tersebut adalah untuk mengurangi tekanan dari *stakeholder* eksternal, mendapatkan akses politis dalam

upaya memudahkan operasi bisnis, dan memudahkan akses kredit dan investasi dari para *stakeholder*. Selain itu, juga untuk menurunkan risiko sosial, risiko lingkungan, risiko politik, risiko pasar, risiko bisnis dan risiko keuangan, meningkatkan reputasi dan nama baik perusahaan, meningkatkan apresiasi *stakeholder*, melindungi perusahaan, dan menebus dosa atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan korporasi. Secara khusus, sasaran akhir dari gerakan *go green* tersebut adalah untuk: (1) menurunkan biaya dan meningkatkan pendapatan, laba, ekuitas dan aset perusahaan, (2) mendukung keberlanjutan bisnis dan laba korporasi dalam jangka panjang, (3) meningkatkan harga atau nilai saham perusahaan; dan (4) mendorong pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan (Lako, 2015b: Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis & Akuntansi).

Akan tetapi, respon profesi akuntansi terhadap berbagai pengorbanan sumberdaya (*costs*) dan upaya (*effort*) untuk aktivitas "*go green*" tersebut sangat konservatif. Demikian pula respon profesi akuntansi terhadap beragam manfaat ekonomi dan nonekonomi dari aktivitas *go green* tersebut juga sangat konservatif. Beragam pengorbanan dan upaya untuk aktivitas *green economy* dan *green business* umumnya diperlakukan sebagai beban periodik (*expense*) yang mengurangi laba dan ekuitas pemilik. Padahal, pengorbanan dan upaya tersebut seharusnya diakui sebagai investasi hijau yang meningkatkan nilai aset hijau (*green asset*) korporasi dan tidak mengurangilaba. Sementara berbagai manfaat ekonomi dan nonekonomi yang diperoleh dari aktivitas *go green* umumnya juga tidak diperhitungkan nilainya karena dianggap sudah menjadi bagian integral dari penjualan atau pendapatan korporasi. Padahal, seharusnya juga diakui sebagai *green revenue* atau *green income*. Hal ini tentu menyebabkan informasi akuntansi yang disajikan kepada para pihak menjadi kurang reliabel dan relevan serta menyedihkan³.

Hubungan Perusahaan Dengan Stakeholder

Hubungan *Stakeholders Orientated Companies* (STKOC) atau *Shareholders Orientated Companies* (SHOC) terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Sosial.

Berdasarkan teori *stakeholders* yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya atau lingkungan (*stakeholders*) sehingga perusahaan harus mementingkan kepentingan *stakeholders* selain *shareholders*. Menurut Deegan (2004), teori *stakeholders* erat kaitannya dengan teori *legitimacy*. Dalam teori *legitimacy* ada suatu *social contract* antara perusahaan dengan masyarakat, sehingga memberikan alasan utama bahwa perusahaan yang berorientasi kepada akan memperoleh *image* tanggung jawab sosial yang baik, yang nantinya akan melegitimasi perilaku perusahaan tersebut. Perusahaan yang berorientasi kepada cenderung akan menyajikan kinerja keuangan dan kinerja sosial lebih baik daripada perusahaan yang berorientasi kepada *shareholders*.

Hubungan *Minimum Strategic Consistency Index* (MSCI) dan Perusahaan dengan *Disconnected Strategic Approach* (DSA) terhadap Kinerja Keuangan.

Perusahaan yang berorientasi kepada , dalam pengungkapan *triple bottom line*, yaitu kinerja keuangan, ekonomi dan sosial, mengungkapkan ada dua atau satu bagian yang berarti menandakan suatu perusahaan *minimum strategic consistency index*. Sedangkan suatu perusahaan yang berorientasi *shareholders* dalam *annual report* mengungkapkan kinerja sosial menandakan *disconnected strategic approach*. menempatkan perusahaan yang menghasilkan *sustainability reports* menunjukkan kinerja keuangan ekonomi lebih baik daripada walaupun dalam hal keuangan tidak mengalami perbedaan yang signifikan.

³ Andreas Lako, "Krisis Ekologi Dan Urgensi Tatakelola Bisnis Dan Akuntansi Hijau," *Akuntansi Indonesia*, no. Desember (2017): 60–64, <http://repository.unika.ac.id/id/eprint/25626>.

Hubungan *Minimum Strategic Consistency Index (MSCI)* dan Perusahaan dengan *Shareholders Approach (SA)* terhadap Indikator Kinerja Keuangan.

Ketika membandingkan kinerja keuangan dan ekonomi dari perusahaan SA (*shareholders approach*) dan MSCI, perusahaan yang visi dan misi-nya berorientasikan yang mana juga menerbitkan *sustainability reports*, menyajikan indikator keuangan ekonomi lebih baik daripada perusahaan yang visi dan misi-nya berorientasikan *shareholders* dan tidak menerbitkan *sustainability reports*. Untuk perusahaan yang bersifat *shareholders approach* dalam *hal triple bottom line reporting*-nya sama dengan 0, yang artinya tidak ada melakukan suatu tanggung jawab sosial perusahaan.

Hubungan *High Strategic Consistency Index (HSCI)* dan Perusahaan dengan *Shareholders Approach (SA)* terhadap Kinerja Keuangan.

Perusahaan dengan *high strategic consistency index* yang menunjukkan adanya return yang tinggi daripada perusahaan SA atau perusahaan yang berorientasi *shareholders*. Untuk perusahaan yang sifatnya HSCI berarti mengungkapkan ketiga bagian dari kategori pengungkapan sosial. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan dengan strategi yang berkomitmen konsisten terhadap dan *sustainability reports* yang tinggi tidak memperlihatkan kinerja keuangan ekonomi yang rendah.

Hubungan sektor MSCI atau Sektor SA dan DSA terhadap Hasil Keuangan.

Hasil keuangan atau kinerja keuangan dan hubungannya terhadap konsistensi strategi perusahaan merupakan kejelasan bahwa sektor yang konsisten berorientasi strategis kepada dapat menghasilkan return yang tinggi, yaitu total *asset* dan dana *shareholders* daripada sektor yang berorientasikan *shareholders*⁴.

Kedudukan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bagian dari Tanggung Jawab Perusahaan

Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Ter-batas Pasal 74 ayat 2 disebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertujuan untuk menunjukkan respon positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mendapat simpati masyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu kepentingan nasional, seperti konservasi alam, pemeliharaan barang seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Bab 1 Pasal 2, menyatakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan⁵.

Kedudukan Akuntansi Lingkungan dalam Keberlanjutan (*Sustainability*) Perusahaan

Akuntansi keberlanjutan atau akuntansi hijau didefinisikan sebagai suatu proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan secara terintegrasi

⁴ Hendro Lukman, "Analisis Komitmen Stakeholders Dan Shareholders Perusahaan Terhadap Kinerja Sosial Dan Keuangan," *Jurnal Akuntansi XVI*, no. 01 (2012): 112–26.

⁵ Muhammad Suyudi, Diyah Permana, and Diki Suganda, "Penerapan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan," *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi* 4, no. 2 (2021): 188–216, <https://doi.org/10.35837/subs.v4i2.1048>.

terhadap objek, transaksi, atau peristiwa keuangan, sosial, dan lingkungan dalam proses akuntansi agar menghasilkan informasi akuntansi keuangan, sosial dan lingkungan yang utuh, terpadu, dan relevan yang bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan ekonomi dan nonekonomi (Lako, 2018 hal: 66).

Lingkungan akuntansi mulai menerima perhatian selama krisis energi pada 1970- an. Meskipun isu tersebut diberikan pertimbangan untuk sementara waktu, krisis energi berakhir dan 1980-an diantar di era baru kemakmuran ekonomi. Praktek akuntansi keberlanjutan memudar ke latar belakang sebelum standar untuk mengukur dampak ekonomi dikembangkan. Perundang-undangan dan kesepakatan tentang bagaimana menghitung faktor lingkungan-sosial dan faktor-faktor apa harus dihitung sulit didapat. Pada 1990-an, suatu kenaikan besar dalam aktivitas perlindungan lingkungan membawa akuntansi lingkungan ke dalam kesadaran konsumen dan bisnis. Secara bertahap beberapa standar akuntansi lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh organisasi akuntansi terkemuka seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Komite Eksekutif American Institute of CPA⁶.

Tuntutan untuk melestarikan alam, akhir-akhir ini menjadi suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan. Tidak ada konsep terlambat untuk memulai pelaksanaan penyelamatan jagat raya dan siisinya. Isuisu akuntansi berkelanjutan sudah merupakan bahan mutlak untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam dunia bisnis, untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan alam. Sejak tahun 2004 Fortune global 250 (salah satu majalah bisnis terkemuka di dunia) sudah mencantumkan penilaian untuk perusahaan-perusahaan yang ratingnya akan dimuat dimajalah ini dengan memasukkan unsur pelaporan yang berwawasan lingkungan dan membuat laporan akuntansi keberlanjutan. Dalam laporan tersebut ternyata baru 52% perusahaan yang di nilai, yang membuat pelaporan berkelanjutan.

Untuk mendukung pelaporan ini akuntani memiliki pelaporan penting, karena diperlukan kerja keras dan peranan mereka beserta kantor akuntannya untuk menyertakan penilaian unsur penyelamatan lingkungan dalam pekerjaannya, demi keberlanjutan profesinya. Tetapi untuk menuju kesana masih terdapat hambatan besar bagi keberhasilan iintegrasii keberlanjutan ke dalam proses organisasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi di bidang akuntansi keberlanjutan, yang dimulai dengan berkurangnya memahami secara jelas difinisi “pembangunan berkelanjutan” (Sustainable development).

Difinisi “Pembangunan yang berkelanjutan” menurut difinisi Brundland adalah “pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini untuk menimbulkan berbagai pertanyaan tentang sejauh mana kebutuhan kita sendiri dan orang-orang generasi mendatang. Disini ternyata sulit menjelaskan hubungan antara waktu, dan geografi diantara segitiga organisasi, lingkungan dan dampak social. Sebagai misal, seberapa jauh rekeneng lingkungan yang ada di suatu perusahaan dapat menjamin untuk kepentingan lingkungan dan seberapa besar porsi peranannya dalam menyelamatkan masa depan.

Tantangan lain adalah kadang-kadang susah untuk menghubungkan antara keberlanjutan dan bisnis sebagai “Tujuan akhir, karena selama ini, umumnya secara tradisional bisnis harus mendapatkan maksimalisasi profit, agar bisa dilihat layak sebagai pertumbuhan modal untuk kepentingan pemegang saham. Meskipun dalam beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa praktek-praktek bisnis yang berkelanjutan dapat mengejar untuk mempromosikan keuntungan jangka panjang yang lebih besar, tetapi hubungan ini ternyata tidak selalu jelas, dan ada tanda tanya

⁶ Fibriyani Nur Khairin et al., “Modul Akuntansi Berkelanjutan,” 2017, 54.

besar, sejauh mana organisasi harus memepertimbangkan faktor-faktor yang tidak meningkatkan keuntungan⁷.

KESIMPULAN

Akuntansi sosial dan lingkungan menjadi krusial bagi perusahaan dalam menyampaikan informasi aktivitas sosial dan perlindungan lingkungan kepada pemangku kepentingan. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada investor dan kreditor, melainkan juga kepada pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat.

Standar Akuntansi Keuangan perlu lebih memperhatikan informasi keuangan terkait operasi perusahaan yang mencakup dampak sosial dan lingkungan. Akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting*) memiliki peran penting dalam menggambarkan biaya-biaya lingkungan, mendorong identifikasi cara mengurangi biaya sambil memperbaiki kualitas lingkungan.

Reformasi menuju Akuntansi Hijau diperlukan untuk mengatasi krisis ekologi dan sosial yang diakibatkan oleh perilaku keserakahan dan ketamakan dalam membangun perekonomian. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan regulasi lainnya mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Perusahaan yang berorientasi kepada *stakeholders* (STKOC) cenderung menunjukkan kinerja keuangan dan sosial yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang berorientasi kepada pemegang saham (SHOC). Konsistensi strategi perusahaan dalam menerapkan prinsip *green business* dan *sustainability reports* berkorelasi dengan kinerja keuangan yang lebih baik.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertujuan untuk menunjukkan respon positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mendapat simpati masyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu kepentingan nasional, seperti konservasi alam, pemeliharaan barang seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Integrasi akuntansi keberlanjutan perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, perubahan dalam paradigma akuntansi diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan informasi yang lebih holistik dan memperhitungkan dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Akuntansi hijau dan keberlanjutan menjadi kunci dalam memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyanti, Lisa Suci. "Sustainability Accounting (Akuntansi Keberlanjutan)." *Jurnal Ekonomi Univesitas Negeri Malang* 1, no. 12 (2021): 54–67.
- Dewi, Mega Eva Sari, Isna Yuningsih, and Yoremia Lestari Ginting. "Analisis Akuntansi Lingkungan Pada Pt Rea Kaltim Plantations Environmental Accounting Analysis at Pt Rea Kaltim Plantations." *Akuntansi* 15, no. 2 (2018): 84–93.
- Lako, Andreas. "Krisis Ekologi Dan Urgensi Tatakelola Bisnis Dan Akuntansi Hijau." *Akuntansi Indonesia*, no. December (2017): 60–64. <http://repository.unika.ac.id/id/eprint/25626>.
- Lukman, Hendro. "Analisis Komitmen Stakeholders Dan Shareholers Perusahaan Terhadap Kinerja Sosial Dan Keuangan." *Jurnal Akuntansi XVI*, no. 01 (2012): 112–26.
- Nur Khairin, Fibriyani, Yoremia L. Ginting, Anisa Kusumawardani, and M. Abadan Syakura. "Modul Akuntansi Berkelanjutan," 2017, 54.

⁷ Lisa Suci Cahyanti, "Sustainability Accounting (Akuntansi Keberlanjutan)," *Jurnal Ekonomi Univesitas Negeri Malang* 1, no. 12 (2021): 54–67.

Suyudi, Muhammad, Diyah Permana, and Diki Suganda. "Penerapan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan." *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi* 4, no. 2 (2021): 188–216. <https://doi.org/10.35837/subs.v4i2.1048>.

Tâm, Trung, Nghiên C Ứ U Và, Chuy Ễ N Giao, Công Ngh, and Ẩ N B Ụ I Chu. "濟無No Title No Title No Title" 01 (2016): 1–23.